

**SKRIPSI**

**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS  
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN  
DALAM KELUARGA**



**OLEH  
HADI ZULKARNAIN  
B 111 09 102**

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS  
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN  
DALAM KELUARGA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**HADI ZULKARNAIN**

**B 111 09 102**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HADI ZULKARNAIN**


**B 111 09 102**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 21 Agustus 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

**An. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : HADI ZULKARNAIN  
Nomor Pokok : B 111 09 102  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK  
MELALUI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2015

Pembimbing I



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing II



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **HADI ZULKARNAIN**  
Nomor Pokok : B 111 09 102  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK  
MELALUI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2015

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1003

## **ABSTRAK**

**HADI ZULKARNAIN (B111 09102), “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga” di bawah bimbingan Hasbir Paserangi dan Wiwie Heryani.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anak, dan faktor yang menjadi kendala dalam keluarga terkait memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dengan data yang ada tentang bentuk dan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan anak serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan pendidikan kepada anak dalam mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga.

Berdasarkan analisis data tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan kepada anak terkait upaya mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga. Hal ini dibenarkan dari hasil penelitian penulis dimana keluarga memiliki dampak besar dalam perilaku individu serta pembentukan vitalitas serta ketenangan dalam diri seorang anak, karena melalui keluarga anak mendapatkan cara berbahasa, nilai-nilai moral, serta kecenderungan berperilaku. Keluarga bertanggungjawab mendidik anak dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan. Untuk itu di dalam keluarga ada sejumlah tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan orang tua. Sedangkan yang menjadi kendala dalam mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi yang rendah, banyaknya jumlah anak yang dimiliki, serta kurangnya partisipasi pemerintah dalam memberikan sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kata Kunci: Keluarga, Perlindungan Anak, Pendidikan Anak, Orang Tua, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## KATA PENGANTAR

*Assalamuakaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehingga penulis akan menerima kritik dan saran dengan menjadikan skripsi ini lebih baik lagi, penulis juga berharap dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang yang menggeluti bidang yang sama dengan penulis.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua tercinta atas

doa yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk penulis demi kesuksesan penulis. Kepada saudara penulis, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan-Nya. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 penulis, yang telah mendorong, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 penulis, yang setia, perhatian, dan peduli meluangkan waktunya membimbing serta memberikan motivasi berharga kepada penulis.
4. Dosen Tim penguji, Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.



5. Ketua dan sekretaris Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, beserta jajarannya dan Segenap Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
7. Keluarga UKM Sepakbola Hukum Unhas. Tempat saya mengembangkan potensi bakat di Bidang Sepakbola dan tempat awal saya belajar banyak menjadi mahasiswa. Kalian luar biasa, *Viva The Yellow Submarine*

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Makassar, Juli Agustus 2015

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Sosiologi Hukum.....	8
B. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	11
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	18
D. Upaya Pencegahan Terjadinya Kejahatan .....	23
E. Tujuan Pemidanaan .....	32
F. Teori Penegakan Hukum .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Jenis Dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Bentuk dan Peranan Keluarga dalam Memberikan Pendidikan Kepada Anak dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Anak .....	55

C. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pola Pendidikan Anak dalam Rumah Tangga.....	67
D. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Memberikan Pendidikan kepada Anak dalam upaya mewujudkan Perlindungan Anak .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini pada dasarnya memudahkan manusia dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Banyak dampak positif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi yang kian pesat terutama di era globalisasi saat ini, dimana manusia selalu dibatasi oleh waktu ditengah banyaknya aktifitas yang harus dilakukan. Terlebih lagi dalam kecanggihan teknologi komunikasi, yang menjadikan manusia seolah tanpa jarak.

Namun di lain sisi, kecanggihan teknologi sangat mungkin memberikan dampak negatif bagi hubungan sosial manusia. Terutama dalam hal pendidikan terhadap anak dalam keluarga. Sebagai contoh maraknya penggunaan alat komunikasi yang mampu mengakses internet dengan mudah sehingga anak dalam kesehariannya lebih terfokus pada aktivitas yang bisa dikatakan mampu mengurangi intensitas komunikasi kepada orang tua. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengakses internet juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku anak. Anak dengan mudah mengakses situs-situs porno, sehingga tidak jarang kasus pelecehan yang dilakukan oleh anak akibat melihat tontonan porno di internet.

Disamping itu itu maraknya tindak pidana yang melibatkan anak dari tahun ke tahun, dimana anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana tidak lepas dari peranan orang tua dalam mendidik anak dalam kesehariannya. Kurangnya pengawasan orang tua dalam menekan pergaulan yang kurang sehat sehingga anak dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Anak mencontohi apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka lihat. Hal ini dikarenakan jiwa anak yang masih dalam tahap pembentukan kepribadian serta kondisi emosional yang masih belum stabil. Maka sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk mengawasi, dan memberikan pendidikan yang positif kepada anak sejak usia dini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UUPA) mendefinisikan keluarga unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>1</sup>

Lingkungan merupakan tempat dimana seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan banyak berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan ini yang mempengaruhi perkembangan anak, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat. Keluarga dipandang sebagai lingkungan dini yang dibangun oleh orangtua dan orang-orang terdekat. Setiap keluarga selalu berbeda dengan keluarga lainnya, dalam hal ini yang berbeda misalnya cara didik keluarga, keadaan ekonomi keluarga. Setiap keluarga memiliki sejarah perjuangan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang turun temurun yang secara tidak sadar akan akan membentuk karakter anak. Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlanter yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan awal bagi anak karena pertama kalinya mereka mengenal dunia terlahir dalam lingkungan keluarga dan dididik oleh orang tua. Sehingga pengalaman masa anak-anak merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya, keteladanan orang tua dalam tindakan sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anak, membentuk anak sebagai makhluk sosial, religius, untuk menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan kembangkan inisiatif dan kreativitas anak. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia-manusia yang dilahirkan.

Anak sebagai bagian dari keluarga sudah seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dari keluarganya, sehingga memiliki bekal sebelum membaaur dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Keluarga sebagai sarana bagi anak dalam berbagi dan belajar menyelesaikan masalah, tak lagi berfungsi sebagai mana mestinya. Bagi orang tua yang memiliki pemahaman yang baik terhadap dampak negatif ini, mungkin akan mengurangi penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi dengan anaknya. Namun bagi orang tua yang

---

<sup>2</sup>Mustining Nur Rasiana, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana".  
<http://www.researchgate.net/> diakses tanggal 3-3-2014

kurang paham dan disibukkan dengan berbagai aktifitas di luar rumah, maka anak akan menjadi korban dalam kecanggihan teknologi ini. Sehingga perkembangan mental anak tidak berkembang dengan baik.

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak, merupakan salah satu indikasi berkurangnya peran keluarga dalam melakukan pendidikan terhadap anak, khususnya yang berkaitan dengan perilaku/moral anak. Mulai dari kejahatan perkelahian antar kelompok bahkan sampai pada kejahatan berat lainnya seperti perampokan, dan pembunuhan. Keadaan ini tentu tidak dapat sepenuhnya disalahkan aparat penegak hukum saja, orang tua juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Sekolah sebagai tempat pendidikan juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mengingat bahwa sekolah hanyalah tempat menimba ilmu dan sangat kurang memberikan pendidikan moral. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat ideal bagi seorang anak untuk belajar berperilaku yang baik.

Orang tua dalam keluarga, haruslah mampu melakukan pengawasan terhadap anak mereka dalam aktifitasnya sehari-hari. Kecanggihan teknologi, yang memungkinkan untuk melihat berbagai kejadian yang tidak semestinya dilihat oleh seorang anak, harus dapat diantisipasi oleh orang tua. Mulai dari pengawasan terhadap penggunaan telepon seluler yang telah mampu membawa anak tersebut ke dalam dunia internet, sampai pada acara-acara televisi yang banyak tidak mendidik.



Kelalaian yang dilakukan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas keseharian anak, tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kenakalan dan bahkan pada tindakan kejahatan. Oleh karena itu, orang tua harus sesering mungkin meluangkan waktu bagi anak mereka, agar setiap peristiwa, baik langsung ataupun melalui media elektronik tidak dicerna oleh anak secara langsung, melainkan telah mendapatkan arahan dari orang tua. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat hal ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimanakah bentuk dan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam keluarga terkait memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pendidikan anak dalam keluarga terhadap penegakan hukum di bidang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam keluarga terkait memberikan pendidikan dalam upaya perlindungan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap orang tua, agar lebih peduli terhadap anak dan dapat memberikan pendidikan moral terhadap anak. Selain itu hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum terhadap putusan hakim akan bermuara pada putusan hakim yang telah memenuhi rasa keadilan warga masyarakat, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan. Selanjutnya pendekatan psikologi hukum terhadap putusan hakim bermuara pada putusan hakim yang dapat memberi rasa aman dan tenteram, rasa damai dan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Menurut Achmad Ali (1998: 11):<sup>4</sup>

“....sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”.

Musakkir mengemukakan bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum

---

<sup>3</sup><http://musakkir.page.tl/>, tanggal 3-3-2014.

<sup>4</sup>Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT Yasrif Watampone: Ujung Pandang. Hal. 11.

mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Musakkir mengemukakan bahwa pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia (*the nature of human being*) dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*a common morality*) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan benar. Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (*koheren*) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda). Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang

---

<sup>5</sup><http://musakkir.page.tl/>, tanggal 3-3-2014.

mendasarinya dijadikan sebagai sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara besar pada kandungan dan makna hukumnya.<sup>6</sup>

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel adalah pada:<sup>7</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka;
3. Pada organisasi social dan perkembangan social serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial, bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan, dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi undang-undang itu, tetapi yang harus kita

---

<sup>6</sup><http://musakkir.page.tl/>, tanggal 3-3-2014.

<sup>7</sup><http://musakkir.page.tl/>, tanggal 3-3-2014.

pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.

## **B. Pengertian dan Hak Asasi Anak**

Istilah anak sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan hampir tiap hari kita mendengarnya. Mungkin saja dengan mudah mendefinisikan kata “anak” tetapi akan lain halnya apabila pernyataan yang sama dilontarkan dalam hukum. Justru kata “anak” sering kali menjadi permasalahan dalam menerjemahkan baik itu bagi para pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun dalam suatu teks undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dengan beraneka ragamnya definisi/pengertian dari kata anak.

Sekarang, dapat dilihat dan dipelajari banyaknya pendefinisian kata anak yang berbeda-beda unsur dan sumbernya, antara lain :

1. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah yang berumur di bawah 16 tahun. Sedangkan ditinjau dari batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295, maka anak adalah yang berumur kurang dari 15 tahun. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka peraturan dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi.

2. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stbd 1874 Nomor : 23) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah.
4. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan.
5. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Definisi anak seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka batasan anak yang akan dipakai penulis dalam skripsi ini adalah batasan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Dari definisi anak tersebut, maka tampak pengaturan hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang batasan umur seorang anak sangatlah bervariasi. Hal ini dikarenakan belum ada ketegasan dalam memberikan perlindungan anak secara utuh baik itu di tingkat peradilan, maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Jika dalam pandangan hukum positif pengaturan hukum tentang anak masih bervariasi, sudah tentu pandangan para ahli/sumber lainnya juga ikut bervariasi. Berikut referensi yang penulis dapat paparkan, diantaranya

“Julia D. Gunarsa dalam memberikan definisi anak, ia menggunakan istilah remaja yang berarti “masa peralihan anak dan masa dewasa yakni antara 12 tahun sampai 21 tahun. Jadi menurutnya perlu ada pengklasifikasian umur atau interval umur antara anak, remaja dan dewasa”.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut pandangan dari pakar Ilmu Kesehatan yakni Paulus Palulu (seorang dokter) yang

---

<sup>8</sup>Supramono, Gatot. 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan. Hal. 1



dikutip dengan judul buku Psikologi Anak dan Permasalahannya, juga memberikan pendefinisian anak berdasarkan klasifikasi, antara lain :<sup>9</sup>

1. Masa Neonatal : Dalam masa ini, manusia berumur 4 minggu.
2. Masa Infancy : Dalam masa ini, manusia berumur 1 bulan sampai berumur 1 tahun.
3. Masa Preschool : Dalam masa ini, manusia berumur 4 tahun sampai berumur 6 tahun.
4. Masa Passchool : Dalam masa ini, manusia berumur 6 tahun sampai berumur 10 tahun.
5. Masa Adolescence : Dalam masa ini, manusia berumur dibagi menjadi 2 bagian yakni :  
Umur 10 tahun – 18 tahun untuk wanita, dan  
Umur 12 tahun – 20 tahun untuk laki-laki.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur seorang anak ialah sejak ia berada dalam kandungan sampai ia berumur 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.

Gagasan mengenai hak anak tercantum dalam *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) yang bersifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali serta pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. DUHAM

---

<sup>9</sup>Ramli, Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni, 1982.hal. 2.

merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan berusaha dengan cara mengajarkan dan mendidik untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pemuatannya secara universal dan efektif, baik diantara bangsa-bangsa negara anggota maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayahnya yang berada dibawah kekuasaan hukum mereka.

DUHAM merumuskan pengakuan atas martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian manusia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tercantum dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak sebagai: "...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa

pemberlakuan definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan bahwa "Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran". Definisi tersebut berlaku semenjak anak masih dalam kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan fisiknya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 dan 2 :

"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan."

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut antara lain adalah:

**Pasal 4 :** Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam pasal 64 ayat (3) :

- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa :

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Menurut Goddard setiap penjahat adalah orang yang *feeble-mindedness* (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan

---

<sup>10</sup>Ibid., hal. 18.

- c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat.
- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak
- f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai "*a function of environment*". Tema sentral aliran ini adalah "*that criminal behaviour results from the same processes as other social behaviour*". Bahwa proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara.<sup>11</sup>

Munculnya teori Asosiasi *diferensial* oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi yaitu :<sup>12</sup>

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 19.

<sup>12</sup> Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 14.



Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.<sup>13</sup>

Menurut Tannenbaum kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kurang mampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.<sup>14</sup>

Lemert (Purnianti, 1994:123) menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya.<sup>15</sup>

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor

---

<sup>13</sup>Dirjosisworo Soedjono, 1994, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana* Tarsito, Bandung.Hal. 125.

<sup>14</sup>Atmasasmita., *Op.Cit.* Hal. 38.

<sup>15</sup>Purnianti, dan M.K. Darmawan, 1980, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Hal. 123.

struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

#### **D. Upaya Pencegahan Terjadinya Kejahatan**

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya yang baik, guna menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat membawa anak ke dalam lingkungan yang dapat membuat anak berbuat jahat. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>16</sup>Sahetapy, J. E., 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung. Hal. 37.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :<sup>17</sup>

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif.

---

<sup>17</sup>Ramli Atmasasmita, Op. Cit. Hal. 66.

**a. Upaya pre-emptif**

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :

- Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental dan spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- Abolisionistik, adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Pola penanggulangan secara *Pre-Emtif* ini dapat berbentuk penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

### ***b. Upaya preventif***

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat

---

<sup>18</sup> Ibid. hal. 79

kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

### ***c. Upaya represif***

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

#### 1) Perlakuan ( *treatment* )

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :<sup>19</sup>

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan

---

<sup>19</sup> Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Remaja Karya. Bandung. Hal. 139.



penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut :<sup>20</sup>

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia .

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

---

<sup>20</sup>Ibid., hal. 141.

## E. Tujuan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa :<sup>21</sup>

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa :<sup>22</sup>

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk

---

<sup>21</sup>Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm. 21.

<sup>22</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran hukum Pidana, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, 2002, Hlm. 23.

mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagaimana tujuan pidana tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (*Reformation, Restrain, dan Retribution*) dan satu D (*Deterrence dan general deterrence*).

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa.<sup>23</sup>

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Sementara H.R. Abdussalam, menyatakan bahwa :<sup>24</sup>

Tujuan pidana reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah menyatakan bahwa.<sup>25</sup>

*Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

---

<sup>23</sup>Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi di Reformasi*, Jakarta, Pradaya Paramita, 1994, Hlm. 28.

<sup>24</sup>Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Jakarta, Restu Agung, 2006, Hlm. 22.

<sup>25</sup>Hamzah Andi, *Op.Cit.* hlm. 28.

Pada tujuan pemidanaan *retribution*, Andi Hamzah menyatakan bahwa :<sup>26</sup>

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr. Abdussalam, mengemukakan bahwa :<sup>27</sup>

Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepantasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah, menyatakan bahwa :<sup>28</sup>

Deterrence berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa :<sup>29</sup>

*Deterrence* terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>27</sup>Abdussalam, *Op.Cit.* hlm. 21.

<sup>28</sup>Hamzah Andi, *Op.Cit.* hlm. 28.

<sup>29</sup>Abdussalam, *Op.Cit.* hlm. 23.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*).
- c. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana.Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk mejatuhkan pidana itu.Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan.Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut.Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus

diikuti dengan pidana, tidak boleh tiidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.<sup>30</sup>

Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>31</sup>

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica* (*moral filosofie*).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pembedaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hlm. 10.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 153-154.

<sup>32</sup> Kanter E.Y. Dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indoneisa Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, Hlm. 59-60.

2. Pembalasan "bersambut" (dialektis).  
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3. Pembalasan demi "keindahan" atau kepuasan (aesthetisch).  
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan(Agama).  
Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan.Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.  
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan



tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa :<sup>33</sup>

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* ( supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut J. Andenas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).<sup>34</sup>

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa :<sup>35</sup>

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

---

<sup>33</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit.* hlm. 25.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 157-158.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung, memaparkan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Menjerakan  
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana  
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.  
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat

---

<sup>36</sup>Marpaung Leden, *Op.Cit.* hlm. 4.

prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).<sup>37</sup>

Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

---

<sup>37</sup>H.R. Abdussalam, *Op.Cit.* hlm. 31.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, menyatakan bahwa "teori prevensi umum bentuknya berwujud pembedaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan".<sup>38</sup>

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pembedaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius, menyatakan bahwa :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan absolute, "*de absolute gerechtighaeid*" yang berwujud pemabalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn, menyatakan bahwa :<sup>40</sup>

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya

---

<sup>40</sup>Rusly Efendi, *Op.Cit.* hlm. 116.

penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana. Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>41</sup>Prakoso Djoko, *Hukum Panitensier Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, Hlm. 10.

## F. Teori Penegakan Hukum

Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>42</sup>

- a. Unsur keadilan,
- b. Unsur pemanfaatan,
- c. Unsur kepastian hukum.

Sedangkan Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa proses perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>43</sup>

Selanjutnya Syahrhan Basah mengatakan bahwa penegakan hukum secara kongkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosudural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>44</sup>

Laica Marzuki mengemukakan bawa tanpa penegakan hukum (*foormel recht*), maka kaidah-kaidah hukum materil

---

<sup>42</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 134

<sup>43</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 121

<sup>44</sup> Sahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 14

(*materieel rech*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*eenpapieren muur*) saja.<sup>45</sup> Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka. Tidak itu saja, tidak ditegakkannya hukum materil mengakibatkan pelanggaran (*tegengesteld*) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (*materieel rech*) yang dibuat guna mengatur tatanan hubungan bermasyarakat dimaksud.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>46</sup>

1. Adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memiliki integritas moral terpuji,
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>47</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi ada undang-undang saja),
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang mengharapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

---

<sup>45</sup> Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005), hal 94

<sup>46</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet.1(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal 3-4

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 8



4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penyusunan skripsi ini dilakukan pada beberapa tempat untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian penulis. Pertama, penulis melakukan penelitian pada beberapa keluarga untuk mengetahui cara apa yang diterapkan dalam proses mendidik anak. Kedua penulis akan melakukan penelitian pada kantor Kecamatan manggala sekaligus meminta kerjasama untuk penyebaran lembaran kuisisioner bagi warga di kecamatan tersebut, serta untuk mengetahui data mengenai lokasi penelitian. Ketiga penulis akan melakukan penelitian di Polsek Manggala untuk mengetahui tingkat dan jenis kejahatan yang melibatkan anak.

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Manggala karena di kecamatan ini tingkat kriminalitas yang melibatkan anak bawah umur bisa dikatakan tinggi. Disamping itu, penulis juga tinggal di wilayah kecamatan ini sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya terkait masalah referensi Undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan penelitian, penulis melakukan penelitian secara kepustakaan dan melalui website-website.

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara dengan orang tua, aktivis pada lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan dan lembaran-lembaran kuisisioner.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah pendidikan terhadap anak dan pemicanaan terhadap anak.

### 2. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan terhadap anak dan pemicanaan terhadap anak.

#### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai narasumber dan menyebarkan lembaran kuesioner yang menjadi sampel di penelitian ini

yakni warga dan orang tua serta anaknya, serta aktifis LSM perlindungan anak dan perempuan serta hakim.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
2. Lembaran kuisisioner yang berisi pertanyaan seputar objek kajian yang penulis teliti.
3. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengumpulkan data yang tidak didapatkan melalui instrument pengumpulan data lainnya.

### **D. Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data

sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Manggala**

Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar dengan luas wilayah sebesar 23.74km persegi. Secara administratif batas wilayah Kecamatan Manggala adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Manggala terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kelurahan Antang, Kelurahan Manggala, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Batua, Kelurahan Bangkala dan Kelurahan Borong. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Tamangapa yaitu sebesar 7,62 km persegi, sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil di adalah kelurahan Borong dan Batua. Jika dilihat dari ketinggian masing-masing kelurahan dari permukaan laut, maka kelurahan Manggala yang paling tinggi yaitu 700m diatas permukaan laut sedangkan yang terendah adalah kelurahan Borong dan kelurahan

Tamangapa yang memiliki ketinggian kurang dari 500m dari permukaan laut.

## 2. Sistem Pemerintahan

Menurut Pasal 66 UU No.22 Tahun 1999, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh Camat melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas, fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Organisasi dalam kecamatan dipimpin oleh Kepala Camat, yang mana saat ini dijabat oleh Drs. Anshar Umar M.Si. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Camat dibantu oleh 6 Kepala Kelurahan, dimana tiap kepala Kelurahan bertugas dengan koordinasi bersama Kepala Kecamatan. Kegiatan pemerintahan di kecamatan Manggala dilaksanakan oleh sejumlah aparat atau pegawai yang berasal dari berbagai dinas dan instansi pemerintah yang jumlahnya

sebanyak 165 orang, terdiri dari 42 orang laki-laki dan 123 orang perempuan.

### 3. Data Penduduk

Tingkat klasifikasi kelurahan di kecamatan Manggala tahun 2014 terdiri dari 6 kelurahan, 349 RT, 65 RW dan 23.681 KK dengan kategori kelurahan swasembada. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2014, jumlah penduduk kecamatan Manggala adalah sebesar 128.088 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan ini yaitu sebesar 5.089 jiwa per 1 km persegi. Secara keseluruhan, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai *sex ratio* nya dengan angka di bawah 100. Jika dilihat pada tiap-tiap rumah tangga, semua kelurahan di kecamatan Manggala memiliki jumlah anggota perempuan yang lebih besar dibandingkan anggota laki-laki, kecuali pada kelurahan Tamangapa dan Batua. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelurahan Tamangapa. Sementara itu kelurahan paling padat di kecamatan Manggala adalah kelurahan Antang.

### 4. Sektor Pendidikan

Jumlah keseluruhan sekolah pada tingkat TK di Kecamatan Manggala adalah sebanyak 39 sekolah, dengan jumlah sekitar 1400 orang murid, dan lebih kurang 160 orang guru. Pada tingkat Sekolah Dasar Negeri berjumlah sebanyak 33 sekolah dengan 10.640 orang murid dan 524 orang guru. Untuk tingkat SMP baik negeri maupun



swasta terdapat sebanyak 11 sekolah dengan 5.199 orang murid dan 438 orang guru. Untuk tingkat SLTA negeri dan swasta terdapat sebanyak 9 sekolah dengan 3.565 orang murid dan 274 orang guru.

Mengenai tingkat kejahatan yang melibatkan anak bawah umur di kecamatan Manggala, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Manggala AKP Anton Tuntunan adapun data mengenai jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibawah umur beserta jumlahnya yang penulis peroleh sepanjang tahun 2012– 2014 di wilayah Kecamatan Manggala adalah sebagaiberikut :

**Tabel 1.** Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh anak Yang Ditangani Oleh Polsekta Manggala.

No	Jenis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Anak Dibawah Umur	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Perkelahian	8	11	10
2	Penganiayaan	6	8	9
3	Perbuatan Asusila	3	5	2
4	Penculikan (membawa pergi anak dibawah umur)	3	4	3
5	Perbuatan kurang menyenangkan	12	15	20
Jumlah		33	41	44

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di kecamatan Manggala cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah

tindak pidana yang melibatkan anak terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 41 (empat puluh satu) kasus dan kembali mengalami peningkatan menjadi 44 (empat puluh empat) kasus pada tahun 2014. Beliau mengatakan bahwa maraknya kasus yang melibatkan anak dari tahun ke tahun disebabkan karena telah bergesarnya nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat sehingga berimbas pada kejahatan terhadap anak. Beliau juga mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak terhadap kecenderungan meningkatnya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak karena sesungguhnya orang tua dari anak itu sendiri lah yang sangat berperan dalam proses pembentukan karakter anak, sehingga pihak kepolisian hanya dapat mewadahi lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang anak untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

## **B. Bentuk dan Peranan Keluarga Dalam Memberikan Pendidikan Kepada Anak, Dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga**

### **A. Bentuk Keluarga**

Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga

diperkuat melalui sentimen-sentimen yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak umumnya adalah darah, atau kadangkala adopsi dan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling bergantung satu sama lain.

Seperti kita ketahui bahwa keluarga merupakan suatu ikatan sosial yang kecil, dan merupakan lembaga dalam masyarakat yang paling dasar, maka dapat dimaklumi bahwa di dalam masyarakat akan dapat banyak sekali keluarga, yang tentu saja tiap-tiap keluarga akan mempunyai ciri-ciri khusus yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih memahami tentang seluk-beluk keluarga maka kita perlu mengetahui bentuk-bentuk, jenis-jenis dan tipe keluarga yang terdapat dalam masyarakat sebagai berikut :

- a. Keluarga Inti (*Nuclear family* atau *Conjugal family* atau *Basic family*) adalah keluarga yang terdiri suami, isteri dan anak.
- b. Keluarga Besar (*Exentended family* atau *Consanguine family* atau *Joint family*) adalah keluarga yang tidak

hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, melainkan termasuk juga orang-orang yang ada hubungan darah dengan mereka, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, keponakan dan sebagainya.

- c. Keluarga Berantai (*Serial Family*) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
- d. Keluarga Duda/janda (*Single Family*) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian, biasa juga dikenal dengan istilah *Single parent*
- e. Keluarga Berkomposisi (*Composite family*) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.
- f. Keluarga Kabitas (*Cohabitation family*) adalah dua orang yang terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.

Berdasarkan data yang penulis peroleh ada dua bentuk keluarga yang penulis temukan pada umumnya yaitu keluarga yang bertipe Keluarga Inti dan Keluarga Besar. Adapun kaitan antara bentuk keluarga dalam pendidikan anak untuk mewujudkan upaya dalam perlindungan anak adalah, tidak bisa dipungkiri bahwa suatu keluarga utuh, yakni yang memenuhi unsur struktur keluarga sangat memberikan dampak yang besar dalam perkembangan moral,

kepribadian dan perilaku anak serta perwujudan perlindungan terhadap anak dalam suatu lingkup komunitas keluarga. Hal ini dikarenakan setiap individu dalam keluarga memiliki peran yang besar dan signifikan terhadap perkembangan anak itu sendiri.

#### B. Fungsi dan Peranan Keluarga

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak namun masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk merealisasikan aturan mengenai perlindungan terhadap anak yang tercakup dalam UU No 23 Tahun 2002, maka keluarga memiliki peran yang sangat besar. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam perwujudan pembentukan perilaku individu serta pembentukan vitalitas dan ketenangan dalam diri anak-anak karena melalui keluarga anak-anak mendapatkan

bahasa, nilai-nilai, serta kecenderungan berperilaku mereka, dan yang paling utama mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kriminalitas, dan juga menghindarkan mereka dari menjadi pelaku kriminalitas. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan.

Untuk itu didalam keluarga ada sejumlah tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan orang tua. Tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggungjawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih serta kedamaian dalam rumah, menghilangkan kekerasan dan mengawasi proses-proses pendidikan. Orang tua harus menerapkan langkah-langkah sebagai tugas mereka, serta menerapkan peranan sebagai orang tua secara maksimal.

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal dan dalam pembelajarannya pun tak terjadwal secara teratur layaknya sekolah-sekolah formal. Namun dalam menjalankan fungsinya, keluarga lebih terfokus dan terarah. Lembaga pendidikan keluarga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menjamin kehidupan emosional anak

Emosional anak akan berkembang secara baik ataupun tidak ditentukan pada masa ini. Karena hubungan antara

pendidik dan terdidik sedarah sehingga orang tua bisa memberikan kasih sayang murni kepada anak. Kasih sayang yang kurang atau berlebih akan mempengaruhi perkembangan emosional anak. Ada hal pokok dalam pembentukan emosional anak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perhatian yang tinggi kepada anak
- b. Mencerahkan kasih sayang secara tulus kepada anak
- c. Membiasakan memberikan teladan yang baik kepada anak dalam kegiatan sehari-hari.

## 2. Menanamkan dasar pendidikan moral

Pada masa ini orang tua dalam mendidik anak lebih kepada bagaimana mereka memberikan keteladanan, baik dalam hal perkataan dan perilaku. Keteladanan disini berguna untuk mendidik anak bagaimana menjadi manusia yang bisa menerapkan nilai-nilai susila yang tinggi. Semua tingkah laku orang tua akan ditiru oleh anak.

## 3. Fungsi sosialisasi anak (Dasar pendidikan sosial)

Pada masa ini anak diajarkan untuk memiliki sikap sosial yang tinggi, seperti sikap saling tolong menolong, tenggang rasa, peduli sesama sehingga

menimbulkan keluarga yang bahagia,damai,dan sejahtera.Setiap anggota keluarga memiliki sikap sosial yang mulia karena itu merupakan keteladanan yang akan membentuk kepribadian seorang anak yang merupakan benih awal untuk bersikap sosial.

4. Fungsi religius (Peletakkan dasar-dasar keagamaan)

Keluarga hendaknya memberikan contoh perilaku keagamaan sejak dini kepada anak,sehingga saat dewasa nanti anak sudah biasa menerapkan nilai-nilai agama dalam keperibadiannya.

5. Fungsi pendidikan

Orang tua wajib menyekolahkan anak guna bekal masa depannya ketika anak telah menjadi dewasa.

6. Fungsi Perlindungan

Keluarga memberikan perlindungan agar semua anggota merasa nyaman dan aman.

7. Fungsi ekonomis

Dalam hal ini, ayah memegang peranan utama sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari bagi keluarga.Namun tak jarang anggota keluarga lain juga berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

8. Fungsi rekreatif



Dalam keluarga sering terjadi kejenuhan setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu dibutuhkan rekreasi atau melakukan aktivitas santai guna menumbuhkan rasa keharmonisan keluarga dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Adapun peran dalam lembaga keluarga itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Ayah

- a. Kepala rumah tangga
- b. Suami untuk istrinya
- c. Ayah untuk anaknya
- d. Pencari nafkah utama
- e. Pendidik
- f. Pelindung
- g. Anggota dari kelompok sosial
- h. Anggota masyarakat dan lingkungan

2. Ibu

- a. Istri untuk suaminya
- b. Ibu untuk anaknya
- c. Pengurus rumah tangga
- d. Pengasuh dan pendidik
- e. Anggota masyarakat dan lingkungan
- f. Pencari nafkah

### 3. Anak

- a. Anak melakukan peran psikososial sesuai tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual sehingga mampu mengambil peran sebagai orang tua dan anggota masyarakat serta lingkungan, dengan kata lain sampai ia bisa menjadi manusia sosial secara utuh.

#### **C. Bentuk Pendidikan yang Diterapkan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Perlindungan Terhadap Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga**

Setiap keluarga sangat beraneka ragam, jadi tentu saja setiap keluarga memiliki metode tersendiri dalam mendidik anak. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal, misalnya latar belakang keluarga orang tua, usia orang tua dan anak, pendidikan serta pengalaman orang tua, karakter orang tua dan anak, serta konsep peran orang tua dalam keluarga dan juga model bimbingan seperti apa yang diterapkan. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal yaitu tradisi yang berlaku dalam lingkungannya, sosial ekonomi lingkungan, dan semua yang berasal dari lingkungan keluarga tersebut dalam menentukan satu bentuk metode pembinaan. Dapat dikatakan bahwa model pembinaan yang dilakukan oleh orang tua yang usianya tidak terlalu jauh dengan anak jauh lebih mudah melakukan pendekatan dengan

seorang anak, dibandingkan dengan orang tua yang usianya terpaut jauh, yakni penerapan model pembinaannya sudah tidak sesuai dengan zamannya.

Selanjutnya latarbelakang pendidikan orang tua juga memiliki pengaruh yang besar. Orang tua yang memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi cenderung memperhatikan perubahan dalam diri seorang anak, misalnya perubahan sikap, tingkah laku bahkan kebiasaan terkecil seorang anak sekalipun. Beda halnya dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung tidak memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seorang anak. Mereka juga kurang mengerti mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri seorang anak. Mereka pada umumnya menerapkan metode pendidikan pada anak dengan cara dan gayanya tersendiri, misalkan apa yang mereka peroleh dari orang tua mereka dahulu maka itu jugalah yang akan didapatkan oleh anak mereka sendiri. Menurut penulis metode seperti ini kurang tepat untuk diterapkan kepada anak karena seharusnya sedini mungkin orang tua mempelajari dan memberikan pola pembinaan karakter yang sesuai dengan hak dan kewajiban seorang anak.

Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan pola asuh orang tua dalam mewujudkan perlindungan anak dalam keluarga penulis mewawancarai beberapa keluarga di lokasi penelitian.

Berdasarkan data dan faktayang penulis temukan di lapangan melalui wawancara kepada 15 orang kepala keluarga, berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara bahwa secara umum ada tiga jenis pola asuh yang penulis temukan oleh masyarakat di kecamatan Manggala, yaitu :

a. Pola asuh Otoriter

Dalam mengelola pola asuhnya orang tua menerapkan banyak aturan yang harus dipatuhi oleh anak, dan apabila anak melanggar aturan tersebut maka ia akan menerima hukuman seperti tidak diberikan uang jajan, tidak diizinkan keluar rumah untuk bermain. Untuk mengatasi perilaku negatif anak dalam hal mengeluarkan bahasa verbal yang kurang baik atau berbicara kotor serta prilaku yang kurang menyenangkan pada umumnya orang tua lebih cenderung melakukan tindakan fisik seperti memukul. Dari 15 narasumber yang diwawancarai, pola asuh ini diterapkan oleh 6 orang kepala keluarga.

b. Pola asuh Demokrasi

Berbeda dengan pola asuh otoriter, pola asuh ini lebih mengajarkan anak untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang ada dikeluarga, dengan caramemberikan penjelasan kepada anaknya mengapa anak harus mematuhi aturan tersebut. Dan ketika anak

tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan, orang tua tidak segera memberikan hukuman, akan tetapi mengajak berkomunikasi mengapa aturan tersebut dilanggar, dan memberikan nasihat-nasihat. Dan ketika memberikan hukuman mereka cenderung tidak bertindak terlalu keras terhadap anak. Dari 15 narasumber yang diwawancarai, pola asuh ini diterapkan oleh 4 orang kepala keluarga.

c. Pola asuh Permisif

Keluarga yang mengasuh anaknya menggunakan pola ini, mereka tetap menerapkan aturan-aturan dalam keluarga. Akan tetapi aturan itu jarang sekali dijalankan. Apabila anak mereka menginginkan sesuatu selalu dipenuhi dan saat anak melakukan suatu kesalahanpun dianggap biasa karena menurut orang tua anak masih belum mengerti karena usia yang masih cukup dini. Untuk anak yang diasuh dengan pola seperti ini, mereka cenderung bersikap manja, mau menang sendiri dan bertindak semaunya. Dari 15 narasumber yang diwawancarai, pola asuh ini diterapkan oleh 5 orang kepala keluarga.

Berdasarkan data temuan yang penulis dapatkan dilapangan, pola asuh yang paling dominan diterapkan oleh

keluarga adalah pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Pada dasarnya ketiga pola asuh ini sudah mendekati efektivitas perlindungan anak dalam keluarga karena sejatinya penulis tidak menemukan adanya kasus kekerasan yang sampai melanggar Undang-undang. Orang tua tetap memperhatikan kenyamanan serta keamanan anaknya walaupun terkadang harus bersikap sedikit keras, dengan alasan demi membina moral anaknya sendiri.

#### **B. Implementasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Rumah Tangga**

Seperti yang kita ketahui bahwa rumah memiliki peran yang sangat sentral dalam pendidikan anak, terutama dalam proses pengembangan karakter anak. Akan tetapi tidak jarang kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam penerapan pendidikan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Menyadari akan hal itu maka dibuatlah Undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, baik didalam maupun diluar rumah.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang

berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Di samping Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terwujudnya negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka diperlukan adanya beberapa langkahstrategis untuk mencegah serta memperkecil tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam sebuah rumah tangga saat ini. Dengan lahirnya Undang-undang ini, muncul paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Selama ini, kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian

masyarakat tidak dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. KDRTA atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Luka memar akibat pukulan atau anak berkepribadian pendiam karena di rumah selalu menghadapi tekanan orangtua sering tidak dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. Tak jarang juga yang masih menilai KDRTA sebagai persoalan individu atau persoalan pribadi dalam rumah tangga, yang tidak berhak dicampuri oleh siapapun, sekalipun Undang-undang.

Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, disayangi, dan harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. Oleh karena anak merupakan generasi penerus di masa depan jadi negara pun turut menjamin kepastian hukum seorang anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Dalam menerapkan pola pendidikan anak dalam rumah tangga, yang kemudian mampu berjalan sinergis dengan UU No. 23 Tahun 2002 pada pasal 50, yang lebih mengarahkan pendidikan anak pada:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, yakni seperti berikut :

1. Memperhatikan hak-hak anak yaitu :
  - a. Kebebasan menyatakan pendapat
  - b. Memperoleh informasi
  - c. Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah

- d. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi
- e. Anak dilibatkan dalam membuat keputusan
- f. Mendapatkan cinta kasih yang tulus
- g. Melatih disiplin, kemandirian
- h. Pengembangan minat dan bakat melalui *skill assesment*

2. Anak harus terhindar dari hal-hal seperti berikut :

- a. Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan “olah bakat”, namun dipaksa untuk melakukannya. Anak seharusnya dibiarkan mengembangkan bakat mereka sendiri.
- b. Menghukum/mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan
- c. Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terbatas.
- d. Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman– temannya
- e. Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak

- f. Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak.

3. Seorang anak harus dijaga tumbuh kembangnya, dan harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
- b. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar secara jasmani dan rohani.

Peran keluarga tersebut akan lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak
- b. Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
- c. Mengeluarkan Kebijakan dan program – program khusus yang menunjang pemenuhan hak-hak anak.

Apabila keluarga dan pemerintah sudah berperan dengan baik, maka seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti berikut :

- a. Diskriminasi anak
- b. Eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran anak
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak

Lebih lanjut, anak juga harus dijaga untuk mempunyai rasa aman tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak merasa takut kepada orang tua, namun justru menganggap orang tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak.

**D. Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Memberikan Pendidikan Kepada Anak Dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga**

Dalam melaksanakan pemberian pendidikan kepada anak dalam upaya mewujudkan perlindungan anak, sudah tentu ada faktor yang mampu menghambat pelaksanaannya. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap orang tua, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala seperti berikut :

- a. Faktor keadaan ekonomi keluarga yang rendah yang menyebabkan orang tua lebih berfokus pada kegiatan mencari nafkah, sehingga waktu yang dihabiskan bersama anak dirumah sangat sedikit.
- b. Banyaknya jumlah anak yang dimiliki sehingga membuat orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak.
- c. Persepsi orang tua tentang pendidikan yang masih rendah, hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman orang

tua akan pentingnya pendidikan dan ketidaktahuan orang tua berkaitan dengan bentuk perhatian yang bisa mereka berikan terhadap pendidikan anak. Keadaan ini merupakan manifestasi dari rendahnya tingkat pendidikan orangtua.

- d. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, sehingga orang tua tidak sepenuhnya mengetahui apa hak-hak anak yang harus mereka penuhi, dan apa kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Keluarga bertanggungjawab mendidik anak dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan, berlandaskan kepada Undang-undang Perlindungan Terhadap Anak. Untuk itu di dalam keluarga ada sejumlah tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan orang tua. Tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggungjawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih serta kedamaian dalam rumah, menghilangkan kekerasan dan mengawasi proses-proses pendidikan.
2. Adapun mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala yang penulis temukan dalam memberikan pendidikan kepada anak dalam upaya mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga yaitu :
  - a. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua
  - b. Faktor ekonomi rendah yang menyebabkan orang tua hanya terfokus pada pencarian nafkah semata
  - c. Banyaknya jumlah anak yang dimiliki, sehingga orang tua cenderung kurang memperhatikan anak

- d. Kurangnya partisipasi pemerintah dan LSM maupun ormas perlindungan anak dalam memberikan penyuluhan dan penerangan hukum terkait UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar :

1. Keluarga yang merupakan satu kesatuan unit terkecil di dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan kualitas anak, agar memberikan pendidikan kepada anak sesuai aturansupaya mampu memenuhi tugas utama dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya yang mencakup pemeliharaan dan perawatan anak, membimbing perkembangan kepribadian anak, serta memenuhi kebutuhan pendidikan formal dan informal sang anak.
2. Peran aktif pemerintah dalam mengupayakan peningkatan sosial ekonomi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat., sehingga akan mampu menunjang sebuah pertumbuhan keluarga yang sehat dan sejahtera.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang lebih meluas kepada setiap lapisan masyarakat mengenai UU No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, agar masyarakat lebih sadar mengenai hak-hak anak yang harus mereka penuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Restu Agung; Jakarta.
- Afendy Rusli, 1986. *Azas-Azaz Hukum Pidana*, Makassar. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI).
- Ali Achmad, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT Yasrif Watampone; Ujung Pandang.
- Basah Sahran, 1983. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni; Bandung.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran hukum Pidana, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo; Jakarta.
- Darma Weda, Made 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Dirjosisworo Soedjono, 1994. *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Tarsito; Bandung.
- Hamzah Andi, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi di Reformasi*. Pradaya Paramita; Jakarta.
- Kanter E.Y., S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indoneisa Dan Penerapannya*. Stora Grafika; Jakarta.
- Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty; Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arif, 1996. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni; Bandung.

- Prakoso Djoko1988.*Hukum Panitensier Di Indonesia*, Liberty; Yogyakarta.
- Priyanto Dwijaya, 2006.*Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*.Refika Aditama;Bandung.
- Purnianti, M.K. Darmawan, 1980.*Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*.PT.Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Rahardjo Soetjipto,1983.*Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni; Bandung.
- Ramli, Atmasasmita, 1982.*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*.Alumni;Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995.*Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*.Mandar Maju; Bandung.
- Sahetapy J. E., 1995.*Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco; Bandung.
- Supramono Gatot, 1996.*Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis (Edisi Revisi)*.Djambatan; Jakarta.
- Syani Abdul, 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya; Bandung.

**INTERNET:**

<http://musakkir.page.tl/>

<http://www.researchgate.net/>

<http://sarbaitinil.blogspot.com/2010/05/uu-perlindungan-anak-dan-fenomena.html>

<https://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>

[http://www.academia.edu/7697550/PENDIDIKAN KARAKTER PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI](http://www.academia.edu/7697550/PENDIDIKAN_KARAKTER_PADA_PENDIDIKAN_ANAK_USIA_DINI)